

Skripsi

**IMPLEMENTASI PROGRAM *COOPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT.VALE TERHADAP KESEJAHTRAAN MASYARAKAT DI
DESA SOROWAKO KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

SORAYA AMIR

Nomor Stambuk : 10564 01841 13



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**IMPLEMENTASI PROGRAM *COOPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT.VALE TERHADAP KESEJAHTRAAN MASYARAKAT DI
DESA SOROWAKO KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SORAYA AMIR

Nomor Stambuk : 105640184113

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Vale Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur

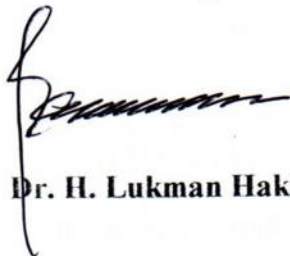
Nama Mahasiswa : Soraya Amir

Nomor Stambuk : 10564 01841 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

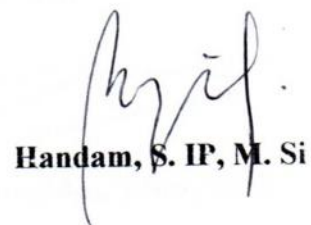
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Lukman Hakim, M. Si

Pembimbing II





Handam, S. IP, M. Si

Mengetahui :


Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M. Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

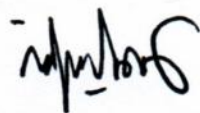

Andi. Luhur Prianto, S. IP, M. Si

PERNYATAAN PENERIMAAN TIM ILMIAH

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0124/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

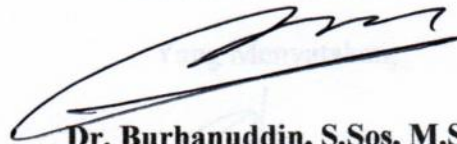
TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Handam, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Soraya Amir
Nomor Stambuk :105640184113
Program Studi :Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 21 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Soraya Amir

ABSTRAK

SORAYA AMIR. 2017, Implementasi program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) PT.VALE Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Di bimbing oleh Lukman Hakim dan Handam).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur serta menggambarkan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil di kumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumnya telah di tentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) PT. Vale Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur belum berjalan dengan efisien ditunjang oleh beberapa faktor penghambat dalam program-programnya tersebut, sehingga implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Implementasi, Corporate Social Responsibility (CSR) , Dampak Lingkungan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur”*

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Lukman Hakim, M. Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Handam, S. Ip, M. Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.ip, M.si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Rudi Hardi. S, Sos. M, Si selaku Penasehat Akademik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Kepada Ibunda Kamariah dan Ayahanda Amirullah serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun material.
6. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepada Pemerintah Kecamatan Nuha, Desa Sorowako Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dan Staf yang bersedia menerima saya untuk melakukan penelitian dilokasi.
8. Kepada pihak PT.VALE indonesia yang bersedia memberikan informasi dilokasi penelitian
9. Kepada masyarakat di desa Sorowako yang bersedia memberikan informasi dilokasi penelitian.
10. Kepada Kakanda AL- Muhajir Haris yang bersedia memberikan masukan serta saran dalam pembuatan skripsi ini.
11. Kepada sahabat, teman-teman angkatan 2013 terkhusus kelas D dan rekan-rekan di Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Pemerintahan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya, Aaamiin.

Makassar, 21 Januari 2018

Soraya Amir

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Pengajuan Skripsi | ii |
| Halaman Persetujuan..... | iii |
| Halaman Penerimaan Tim..... | iv |
| Halaman Keaslian Karya Ilmiah | v |
| Abstrak | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi..... | ix |
| Daftar Tabel | xi |
| Daftar Gambar | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN TEORI | |
| 2.1 Kerangka Teori..... | 7 |
| 2.1.1 Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)..... | 7 |
| 2.1.2 Implementasi | 22 |
| 2.1.3 Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan Beserta Dampaknya..... | 28 |
| 2.1.4 <i>Sustainable Development</i> | 30 |
| 2.2 Kerangka Pikir | 37 |
| 2.3 Fokus Penelitian | 39 |
| 2.4 Deskripsi Fokus Penelitian | 39 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian | 40 |
| 3.2 Jenis Dan Tipe Penelitian | 40 |
| 3.3 Sumber Data | 41 |
| 3.4 Informan Penelitian | 42 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 44 |
| 3.7 Keabsahan Data | 45 |

| | |
|--|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 1.1 Deskripsi Objek Penelitian | 48 |
| 1.2 Implementasi Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Vale Vale terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur ... | 53 |
| 1.3 Faktor Penghambat | 65 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 69 |
| 5.2 Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 : Data Informan | 43 |
| Tabel 4.1 : Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Tahun 2014 | 51 |
| Tabel 4.2 : Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT.Vale tahun 2016 | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir | 38 |
| Gambar 4.1 : Pemegang saham PT. Vale tahun 2016 | 48 |
| Gambar 4.2 : Wilayah Kontrak Karya PT. Vale 2016 di Sulawesi Selatan | 50 |
| Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Pt.Vale Bidang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)..... | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etnis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Putra(2015). Investasi di bidang eksplorasi dan penambangan pada negara-negara berkembang terutama Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibarengi dengan meningkatnya kesadaran para pihak korporasi pada persoalan tanggung jawab sosial *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan khususnya disektor sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi salah satu isu yang paling penting yang dihadapi industri pertambangan. Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi meluas maknanya, salah satunya adalah niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Ide dasar *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebenarnya sederhana, yaitu pentingnya sikap sosial perusahaan tambang kepada masyarakat disekitar wilayah pertambangan.

Ide ini tentu tergolong mulia, sebab umumnya perusahaan penambangan terkesan lebih banyak berurusan dengan permasalahan permodalan dan kalkulasi target keuntungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan tersebut diatas yang biasanya mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan penduduk sekitar wilayah penambangan. Pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) baru dirasakan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri BUMN memang secara tegas tidak menggunakan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), namun program kemitraan yang diatur sebetulnya identik dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pula.

Dalam kaitan itulah, penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui program *Community Development* (CD) dipandang bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Melihat pada kondisional semacam ini maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kepermukaan. Penulis menganggap bahwa pengambilan judul diatas cukup strategis.

Dunia industri sering menjadi tertuduh utama dalam masalah kerusakan lingkungan, karena “kerakusannya” dalam mengeksploitasi sumber daya alam,

sebagaimana dalam kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara, tetapi industri pula yang menjadikan peradaban manusia maju dengan pesat. Tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam menguasai industri menjadi parameter kualitas kehidupan manusia. Masalahnya adalah bagaimana mengolah jalan simpang diantara dua kepentingan yaitu, kepentingan industri dan kelestarian lingkungan.

Newmont Mining Corporation merupakan perusahaan penghasil emas terkemuka yang beroperasi di lima benua. Didirikan pada tahun 1921 di kota New York dan didaftarkan pada Bursa Saham New York (NYSE) sejak tahun 1925, Newmont juga terdaftar di Bursa Saham Australia dan Toronto. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham terkemuka di dunia Newmont terikat pada standar profisiensi yang tinggi serta kepemimpinan di bidang-bidang manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan bagi para karyawannya dan masyarakat sekitar.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007. Melalui Undang-Undang ini, industri atau korporasi wajib untuk melaksanakannya, Korporasi tidak hanya dituntut memiliki kepedulian pada isu-isu lingkungan hidup, tetapi juga pada isu-isu sosial dari masyarakat yang merasakan langsung dampak-dampak negatif dari operasi perusahaan. Industri atau korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.

Rahmatullah (2011) menjelaskan dengan banyaknya berdiri suatu perusahaan di Indonesia dengan berbagai permasalahan tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pihak pemerintah SULAWESI SELATAN itu sendiri menegaskan tentang kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh setiap perusahaan yang berdiri di Sul-Sel yang menyatakan bahwa dalam pasal 13 peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan / (*Corporate Social Responsibility*) di Sulawsi Selatan. Rahmatullah, (2011) menjelaskan *Corporate Social Responsibility (CSR)* seringkali dikaitkan dengan persoalan etika dalam bisnis. Kajian etika dalam bisnis akan memberikan focus pada perilaku korporasi dalam berporasi, yang diukur dengan aspek moralitas.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Luwu Timur belum di lakukan secara efektif, alasannya karena belum meratanya pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimana masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari PT. Vale yang sudah menjadi hak masyarakat menengah kebawah, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* hendaknya lebih merata jangan sampai terjadi penyimpangan atau penyalagunaan wewenang yang seharusnya di nikmati oleh masyarakat menengah kebawah (lutimterkini.com 2016).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul **implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur ?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur ?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis bagaimana bentuk dan manfaat program *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang dirasakan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur terhadap PT.VALE, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara praktis, adalah sebagai sumber informasi atau bahan masukan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya khususnya dalam upaya terhadap kesejahteraan masyarakat mengurangi kerusakan lingkungan di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.
2. Secara akademis adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), sehingga dengan penelitian ini sedapat mungkin berguna dan sebagai tambahan wacana dan sebagai salah satu masukan bagi yang beminat untuk meneliti lebih jauh tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Carroll dalam Unang (2011) *Corporate Social Responsibility (CSR)*, adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, hukum, etika serta kontribusi pada isu sosial. Dari konsep Carroll dalam Unang (1979) menunjukkan bahwa setiap perusahaan dalam bentuk kegiatannya *Corporate Social Responsibility (CSR)*, harus melihat beberapa aspek karena dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh Carroll itu bersifat memberikan kontribusi dalam kepedulian dan pengembangan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan oleh Carroll.

Selain itu Bowem (1953) menjelaskan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan, yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, menurut *World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)* merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi pada komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup karyawan beserta seluruh keluarganya, diakses dari Jurnal Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurut Hartman dalam Widenta (2011) *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan dengan operasional bisnis sehingga perusahaan harus mengidentifikasi kelompok-kelompok *stakeholder* dan menggabungkan kebutuhan serta kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan operasional dan strategis. Menurut Hartman dalam Widenta (2011) secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Serta bagaimana memberikan pengaruh terhadap dibidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

Menurut Hartman dalam Widenta (2011) melihat dari beberapa aspek tersebut dalam bidang ekonomi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan dapat meningkatkan atau mempengaruhi suatu bentuk perekonomian, dalam aspek hukum perusahaan dituntut untuk mengikuti setiap peraturan yang berlaku yang menyangkut tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), dalam artian bahwa setiap perusahaan baik skala lokal maupun perusahaan asing harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan ketentuan hukum yang berlaku, jika dilihat dari segi etika serta kontribusi pada isu sosial perusahaan harus, berperan penting dalam menjaga etika dalam kegiatan perusahaan tersebut seperti dalam memperhatikan dampak yang dihasilkan, serta menjaga keadaan lingkungan.

Menurut Hartman dalam Widenta (2011) *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan dengan operasional bisnis sehingga perusahaan harus mengidentifikasi kelompok-kelompok *stakeholder* dan menggabungkan kebutuhan serta kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan operasional dan startegis. Menurut Hartman dalam Widenta (2011) secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Serta bagaimana memberikan pengaruh terhadap dibidang ekonomi, social dan lingkungan.

Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970an setelah John Elkington mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*. Ditegaskan Elkington bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikemas dalam tiga focus yang disingkat 3P, singkatan dari profit, planet dan people. Penjabarannya, perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Selain itu, Ambadar (2008) mengemukakan beberapa motivasi dan manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan meliputi:

1. Perusahaan terhindar dari reputasi negatif perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku buruk perusahaan
2. Kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di lingkungan dimana perusahaan bekerja
3. Perusahaan mendapat rasa hormat dari kelompok inti masyarakat yang membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan
4. Perilaku etis perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar sehingga dapat beroperasi secara lancar.

Di Indonesia hampir seluruh kalangan perusahaan swasta, baik BUMN memiliki kebijakan sosial yang strategis bagi image perusahaan itu sendiri. Berikut pengertian tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan Undang Undang/Peraturan yang terdapat di Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa pengertian dan lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara undang-undang/peraturan yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan. Meski demikian, para pengusaha sangat serius menyusun program pemberdayaan masyarakat melalui tanggungjawab sosial perusahaan. Isu-isu yang diangkat juga beragam dan relevan dengan

persoalan yang secara riil dihadapi oleh masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat yang dikelola melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini bahkan sudah banyak yang mendapat pengakuan dunia internasional, sebab dinilai cukup sukses mensinergikan kegiatan perusahaan dengan aktivitas masyarakat lokal, maupun karena komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari kedua-belah pihak untuk menjadi mitra yang kuat dan saling percaya.

Terdapat pula bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) , menurut Rudito dalam Yeriko (2007) membagi program bagi kegiatan program yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam konteks tanggung jawab sosialnya kedalam tiga bentuk:

1. *Public relation* bentuk ini lebih menekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan kepada komunitas, dengan cara membuat suatu kegiatan sosial sehingga menanamkan *image* bahwa perusahaan yang bersangkutan telah menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk kegiatan sosial. Pada dasarnya kegiatan atau usaha ini menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan komunitas, khususnya menanamkan sebuah persepsi yang mengenai perusahaan terhadap komunitas
2. *Strategi defensif* bentuk ini biasanya dijalankan oleh perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan terhadap karyawannya dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas yang sudah terlanjur berkembang.
3. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik, yang benar-benar berasal dari visi perusahaan itu. Bentuk ini merupakan bentuk keinginan tulus

dari suatu perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya, yang didorong dan berkaitan erat dengan kebudayaan perusahaan yang berlaku sehingga kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan sudah tersirat dalam etika yang ada pada perusahaan tersebut.

Selain dari pada bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) terdapat pula manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR), menurut, Wibisono (2007) manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut uraian manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), diantaranya:

1. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*)
2. Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya

sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) , akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

3. Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) , akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.

Bagi negara praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang baik akan mencegah apa yang disebut “*corporate misconduct*” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar yang tidak digelapkan oleh perusahaan. Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) , dan menjadi bagian penting adalah menjalin hubungan yang baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan izin yang diberikan pemerintah, dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya, juga secara sadar turut membangun kepedulian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Wibisono, 2007).

Keterlibatan perusahaan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) , dilatar belakangi dengan beberapa kepentingan. Menurut Mulyadi (2003) setidaknya bisa diidentifikasi tiga motif keterlibatan perusahaan, yaitu: motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal.

Menurut Rienstra (2015) berikut terdapat beberapa prinsip dasar dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) .

1. *Tripple Bottom-lines*, yaitu tiga aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjelaskan praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) . Tiga aspek tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi menyangkut kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi masyarakat, aspek sosial menyangkut keadilan sosial, sedangkan lingkungan menyangkut kualitas lingkungan.
2. *Voluntary* merupakan sikap sukarela dari perusahaan berarti tanpa ada paksaan dari pihak lain dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) . Praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan merupakan murni kesadaran dari perusahaan yang menjalankan.
3. *Sustainable* berarti suatu tanggung jawab untuk membantu generasi saat ini untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena terdapat dalam sikap kesukarelaan perusahaan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka memang perusahaan tidak mengambil keuntungan ataupun mengharapkan keuntungan dari aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan sebab semua proses manajemen sampai pengambilan keputusan di tangan masyarakat lokal. Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini berujung pada terwujudnya kemandirian masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata sehingga mutu Sumber Daya Manusia (SDM) semakin berkualitas.

4. *Philantrophy* adalah konsep di mana apa yang diberikan oleh perusahaan dan apa yang dijalankan oleh perusahaan selaras dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan untuk meraih keuntungan, melainkan karena tindakan dermawan.
5. *Win-win solution* yakni perusahaan dan publik yang menjadi target praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) mendapatkan keuntungan. Ini artinya antara bisnis dan masyarakat saling bekerjasama sehingga akan saling menguntungkan. Bisnis akan diuntungkan dengan lingkungan yang baik dan SDM yang bermutu. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi aktivitas bisnis yang berujung pada eksistensi bisnis itu sendiri. Begitu pula dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu akan memudahkan bisnis dalam mencari penerusnya, misalnya anak-anak dari program pemberdayaan lokal pariwisata.
6. *Stewardship principle* dalam hal ini perusahaan ketika melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) khususnya dalam program sosialnya ada pendampingan untuk membantu masyarakat. Biasanya ditandai dengan keterlibatan manajemen atau karyawan perusahaan dalam mendampingi masyarakat, atau program yang dijalankan tidak dalam waktu pendek melainkan secara berkelanjutan hingga masyarakat mandiri.

Mulyadi (2003) menyatakan pada umumnya perusahaan di Indonesia menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) , atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara normatif, idealnya tanpa adanya protes

dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Ide mengenai konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) , juga dilandasi pemikiran demikian (*UN Global Compact*, hal. 20). Menurut Mulyadi (2003) Secara filantropis perusahaan seharusnya mendistribusikan keuntungan setelah mereka memanfaatkan *resources* di lokasi dimana masyarakat berada. Hal ini adalah kewajiban moral, namun motif yang didasarkan pada komitmen moral tersebut masih sebatas wacana dan belum terlihat nyata. dalam tulisan yang berjudul pengelolaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pendekatan, keberpihakan, dan keberlanjutannya membagi *stakeholders* berdasarkan kepentingannya

Dalam konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR), bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional yang diimplementasikannya. Pemerintah yang menjadi penanggung jawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai Mulyadi (2003).

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), diperusahkan pada umumnya dipengaruhi beberapa faktor menurut Wibisono (2007). Pertama, terkait dengan komitmen pemimpinnya. Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan harap mempedulikan masalah sosial. Kedua, menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Ketiga, regulasi dan system perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikalion, akan lebih berpotensi member semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Saidi dalam Tanudjaja (2006) menyatakan ada empat model *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia yaitu:

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola

Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.

3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Menurut Untung dalam Wijaya (2015) menyatakan manfaat tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan,
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara social,
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan,
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha,
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas,
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah,
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*,
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator,
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan,
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Terdapat manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi masyarakat adalah menurut Chakraborty dalam Mardikanto (2014) menjelaskan *Corporate Social Responsibility* (CSR), tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang, saham karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta lingkungan.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, Tanaya dalam Mardikanto (2014) menyatakan bahwa, esensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wujud dari *giving back* dari perusahaan kepada komunitas atau masyarakat

sekitar, yang dapat dilakukan untuk menghasilkan bisnis berdasarkan niat tulus guna member kontribusi yang paling positif pada masyarakat sekitar *stakeholders*. Selanjut bahwa tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan hanya membangun komunitas semata. Mardikanto (2014) menjelaskan bahwa inti tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu bagaimana pembangunan komunitas bisa terus eksis berada dalam masyarakat sebagai upaya untuk keseimbangan lingkungan dan alam.

Mardikanto (2014) menjelaskan dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Intinya manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

Fajar dalam Suhadi (2012) menjelaskan selain dalam manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR), bagi masyarakat terdapat juga bagaimana perusahaan menjaga kearifan lokal dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), kearifan lokal sendiri adalah bagaimana perusahaan tetap melakukan kegiatan perusahaannya dengan tetap mengizinkan dan mengembangkan budaya, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai bentuk komunikasi lokal yaitu upaya untuk menciptakan sosial *value* yang bermakna bagi masyarakat

dan perusahaan demi tercapainya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Melalui interaksi antara perusahaan dan masyarakat tersebut kemudian dapat tercipta hubungan timbal balik yang saling pengertian dan memberikan keuntungan bagi keduanya. Fajar dalam Suhadi (2012) menyatakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai suatu aktifitas perusahaan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial dengan dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi sebagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat. Gunawan dalam Suhadi (2012) menjelaskan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal, dengan menggunakan konsep *communitny development* mempunyai pengertian bahwa masyarakat setempat yaitu, sekelompok masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. *communitny development* mempunyai tiga karakter yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat dan berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat mendapatkan keuntungan dan tetap dapat melestarikan budaya setempat, tanpa tergantung oleh aktifitas perusahaan disekitarnya pihak perusahaan juga dapat menjalankan aktifitas dengan baik tanpa ada protes konflik dari masyarakat setempat.

Menurut Putra (2015) menjelaskan selain kearifan lokal, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga merupakan langkah dalam startegi

politik guna untuk meraih simpati masyarakat maka pelaku politisi siapapun, yang berkehendak dengan rakyat, maka harus melakukan banyak hal menyangkut terhadap masyarakat. Dan itu semua dapat tercapai dengan mudah ketika secara aktif parpol menjalankan kegiatan sosial terhadap masyarakat atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Masyarakat sangat menghargai dan menaruh simpati besar terhadap lembaga politik yang mengerti dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Meskipun saat ini konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), banyak menyoal kepentingan bisnis *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga sangat relevan dalam konteks pemasaran politik.

Menurut Putra (2015) ada tiga alasan penting mengapa suatu organisasi harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial, yaitu:

1. Organisasi adalah bagian dari masyarakat.
2. Organisasi dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiolis mutualisme.
3. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan untuk menghindari konflik sosial.

2.1.2. Implementasi

Widodo dalam Rifka (2012) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Pelaksanaan kebijakan

merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak, serta manfaat yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran.

Menurut Lane dalam Akip (2015) menyatakan implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu Sabatier (1986).

Grindle, (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Grindle (1980) mengatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*). Grindle, (1980) menjelaskan dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan

derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Cooper, (1998) menyatakan secara sederhana, implementasi merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) ke dalam aksi kebijakan. Pemahaman seperti ini berangkat dari pembagian proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahap di mana implementasi berada di tengah-tengahnya. Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses yang terjadi setelah sebuah produk hukum dikeluarkan yang memberikan otorisasi terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu.

Ripley, (1986) menjelaskan implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah, yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan dan non-tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya tujuan. Menurut (Schneider, 1982) menjelaskan sebagai salah satu representasi para ahli tersebut, menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*).

Sementara itu Sabatier dalam Purwanto (1986) menjelaskan, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variable utama yang dianggap member kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variable tersebut adalah:

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
3. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.
4. Komitmen dan keahlian parapelaksana kebijakan.
5. Dukungan para *stakeholder*.
6. Stabilitas kondisi social,ekonomi, dan politik.

Menurut Goggin (1990) keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

1. Isi kebijakan (*the content of the policy message*)
2. Format kebijakan (*the form of the policy message*)
3. Reputasi actor (*the reputation of the communicators*)

Isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta ketelibatan publik. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*) konsistensi kebijakan (*policy consistency*), *frequency* serta penerimaan isi kebijakan *receipt of message* sedangkan *reputation of communicators* terdiri dari legitimasi dan kredibilitas actor-aktor pemerintah daerah. selanjutnya ada beberapa model implementasi yang biasa digunakan dalam menentukan suatu kebijakan.

Model Grindle dalam Nugroho (2012) bahwa model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya menurut Grindle dalam Nugroho (2012) adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Nugroho (2012) jika kita mencermati model grindle, kita dapat memahami bahwa keunikan model grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para actor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Selanjutnya Edward dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran target group sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti

apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. *Standard Operating Procedures* (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.3. Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan Beserta Dampaknya

Juwita dalam Soemarwoto (2004) mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah *environment*. Selanjutnya dikatakan, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Menurut FAO masalah lingkungan di negara-negara berkembang sebagian besar disebabkan karena eksploitasi lahan yang berlebihan, perluasan penanaman dan penggundulan hutan, Reyntjes (1999).

Sandy (1980) menjelaskan bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan industrialisasi, permasalahan penggunaan lahan sudah umum terjadi. Pemikiran secara intuitif dalam penggunaan lahan sudah sejak lama dilakukan, tetapi penggunaan secara lebih efisien dan dengan perencanaan baru

terwujud jelas setelah Perang Dunia Ke-1. Soerjani dalam Mardikanto (1992) menjelaskan penyebab utama kerusakan lingkungan pertama adalah akibat ulah manusia dan yang kedua akibat alam, dalam hal ini bencana alam. Tetapi penyebab akibat ulah manusia sangat tinggi dan besar pengaruhnya dibandingkan kejadian oleh alam yang tidak setiap hari terjadi. Lingkungan yang rusak tidak menyediakan lagi kondisi habitat yang sesuai bagi kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup seperti hewan akan berpindah mencari suatu tempat yang ideal agar kebutuhan hidupnya seperti makanan, minum dan ruang hidup dapat terpenuhi.

Menurut Pulungan (2013) menjelaskan permasalahan lingkungan dapat di kurangi dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan yang intensif. Pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan di Indonesia mengacu pada UU No.23 Th.1997. UU ini berisi tentang rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Upaya ini dilakukan agar kekayaan sumber daya alam yang ada dapat berlanjut selama ada kehidupan.

Menurut Wati (2012) faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Kerusakan lingkungan hidup faktor alam, bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup.
2. Kerusakan lingkungan hidup faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Hakim (2013) untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan, manusia harus melakukan upaya pelestarian lingkungan. Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menanam kembali hutan yang gundul.
2. Memperbanyak area hijau.
3. Mengatur pembuangan, pengelolaan, dan pendaur-ulangan sampah.
4. Menggunakan konsep “*green building*” ketika membangun bangunan.
5. Menghentikan dan menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.
6. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan
7. Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
8. Mengajarkan dan mengkampanyekan pola hidup ramah lingkungan kepada masyarakat.

2.1.4. Sustainable Development

Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam

keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut (Asy'ari, 2009) menjelaskan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang baik adalah dengan penerapan *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat, sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Menurut Brundtland dalam (Hadi, 2012) pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Menurut Salim dalam (Hadi, 2012) pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja dalam (Jaya, 2004) menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
2. *Safe guarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).

5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi Fauzi dalam (Jaya, 2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan :

1. Menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.
2. Menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, Oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.
3. Perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi.

Selain definisi operasional diatas, Haris dalam (Jaya, 2004) menjelaskan bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman :

1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
2. Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial, secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Soemarwoto dalam (Imawrai, 2011) mengajukan enam tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang kepala pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolak ukur itu meliputi:

1. Tolak ukur pro lingkungan hidup (*pro-environment*) dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah

debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya.

2. Tolak ukur pro rakyat miskin (*pro-poor*) bukan berarti anti orang kaya. Yang dimaksud pro rakyat miskin dalam hal ini memberikan perhatian pada rakyat miskin yang memerlukan perhatian khusus karena tak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah serta tidak memiliki modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah. Pro rakyat miskin dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI) yang dikembangkan PBB. Kedua indikator ini harus dilakukan bersamaan sehingga dapat dijadikan tolok ukur pembangunan yang menentukan. Nilai HDI dan HPI yang meningkat akan dapat menunjukkan pembangunan yang pro pada rakyat miskin.
3. Tolak ukur pro kesetaraan jender/pro-perempuan (*pro-women*), dimaksudkan untuk lebih banyak membuka kesempatan pada kaum perempuan untuk terlibat dalam arus utama pembangunan. Kesetaraan jender ini dapat diukur dengan menggunakan *Genderrelated. Develotmenta. Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) untuk suatu daerah. Jika nilai GDI mendekati HDI, artinya di daerah tersebut hanya sedikit terjadi disparitas jender dan kaum perempuan telah semakin terlibat dalam proses pembangunan.
4. Tolak ukur pro pada kesempatan hidup atau kesempatan kerja (*pro-livelihood opportunities*) dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator seperti misalnya indikator demografi (angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja,

dan sebagainya), pendapatan perkapita, dan lain-lain. Indikator kesejahteraan masyarakat juga dapat menjadi salah satu hal dalam melihat dan menilai tolok ukur ini.

5. Tolak ukur pro dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu keharusan, karena pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI.
6. Tolak ukur anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dilihat dari berbagai kasus yang dapat diselesaikan serta berbagai hal lain yang terkait dengan gerakan anti KKN yang digaungkan di daerah bersangkutan .

Buah pemikiran pakar lingkungan ini sejalan dengan buah pemikiran beberapa konseptor pembangunan berkelanjutan yang dirangkum oleh Gondokusumo (Imawrai, 2011) dimana disebutkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk tercapainya proses pembangunan berkelanjutan yang diantaranya adalah :

1. Pro ekonomi kesejahteraan, maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan.
2. Pro lingkungan berkelanjutan, maksudnya etika lingkungan *non antroposentris* yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.

3. Pro keadilan sosial, maksudnya adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik, menghargai *diversitas* budaya dan kesetaraan jender.

2.2. Kerangka Pikir

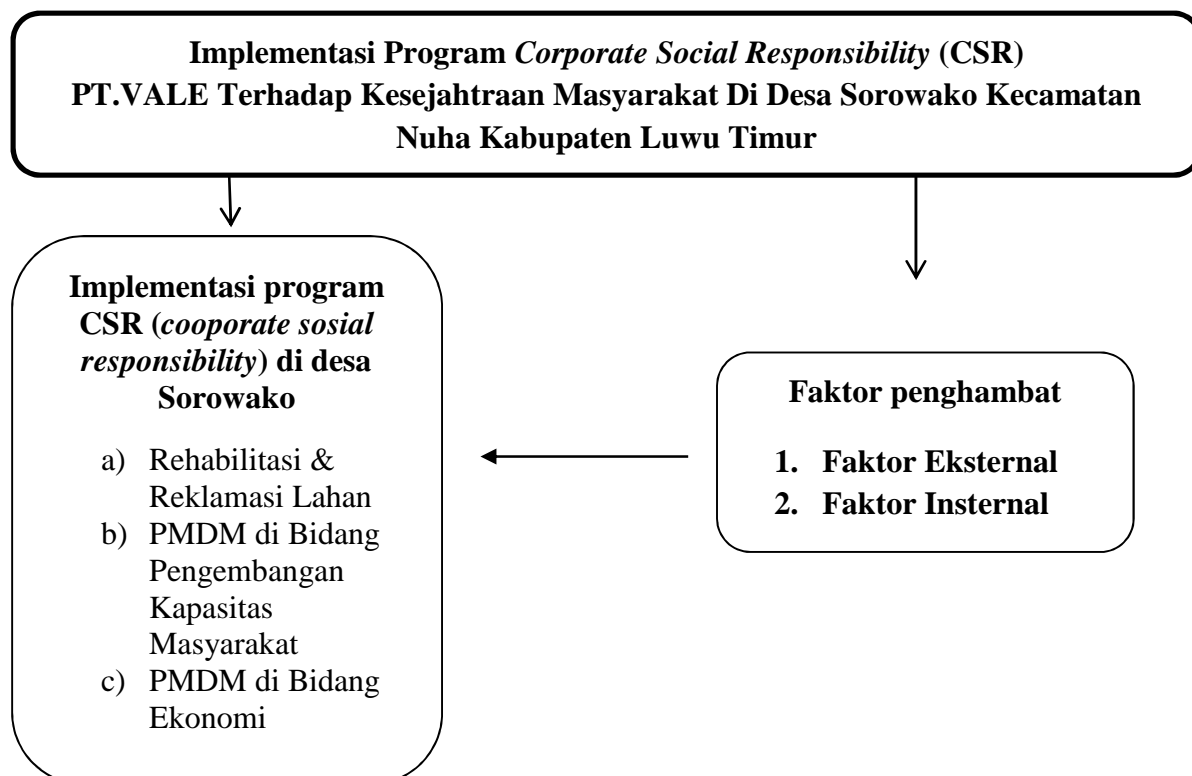
Dalam merumuskan kerangka pikir peneliti menggunakan tiga fokus yang disingkat 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Dalam hal ini peneliti membagi dalam beberapa indikator implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam kerangka pikir, karena dalam teori pembangunan berkelanjutan pihak perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Pada aspek yang lain memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Dapat dipahami bila *profit* merupakan orientasi yang harus dikejar oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Kemudian, *people* diartikan perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia disekitar mereka beroperasi. Beragam model telah dijalankan pihak perusahaan dalam memberikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan pembangunan berkelanjutan seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal dan sebagainya. Sedangkan *planet*, dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada lingkungan hidup.

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan tentang implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. Peneliti mengkaji beberapa indikator dari implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti rehabilitasi dan reklamasi lahan, program masyarakat desa mandiri di bidang ekonomi dan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat dan di bidang ekonomi. Penelitian ini juga mengkaji faktor penghambat dalam implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale.

Aneka kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang biasa dijalankan kaitannya dengan ini adalah penghijauan, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman. Untuk memudahkan pemahaman dari penjelasan diatas maka penulis merumuskan dalam bentuk bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir



2.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa indikator yaitu, rehabilitasi dan reklamasi lahan, Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang pengembangan kapasitas masyarakat, dan Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang ekonomi.

2.4. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Rehabilitasi dan reklamasi lahan yaitu pihak PT. Vale melakukan pemulihan kondisi lahan serta memperbaiki atau memulihkan kembali lahan pasca tambang.
- b. Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) yaitu program dari PT. Vale yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar.
- c. Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang pengembangan kapasitas masyarakat yaitu suatu inisiatif yang bermaksud untuk mengenali kebutuhan dan cara untuk membangun kapasitas pada masyarakat sekitar yang merasakan dampak langsung akibat adanya perusahaan di Desa Sorowako.
- d. Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang ekonomi yaitu bantuan yang berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah di Desa Sorowako.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Soroako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur dengan pertimbangan bahwa implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perlu mendapat perhatian dari semua kalangan yang terkait yaitu pemerintah Kecamatan, Pemerintah desa dan Masyarakat setempat. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena dalam implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* terkadang ada penyalagunaan wewenang dan lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.

3.2. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan berkaitan dengan implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa soroako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.

3.3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau indepth interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung pada daerah penelitian, dan melalui wawancara secara langsung dengan melakukan alat bantu seperti daftar pertanyaan. Wawancara langsung tersebut dilakukan dengan informan oleh karyawan PT.VALE, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Camat, pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Peneliti menganggap bahwa informan-informan diatas mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan memiliki akses terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari

melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Dalam data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh melalui data-data atau dokumen-dokumen mengenai implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Vale dari pihak-pihak bersangkutan, dapat bersumber dari media massa, internet, jurnal dan dokumentasi foto. Data sekunder digunakan untuk mendukung validitas data primer supaya memiliki landasan teoritis dan dapat menjadi pelengkap informasi yang sudah didapatkan dilokasi penelitian.

3.4. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan aparat Pemerintah di Desa Sorowako yang tidak lain adalah masyarakat, pemerintah dan karyawan PT. Vale Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan Implementasi Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur . Untuk lebih jelasnya, karakteristik informan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Data Informan

| No | Nama | Jabatan | Inisial | Jumlah |
|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------|
| 1 | Charles | Karyawan PT.Vale | | 1 orang |
| 2 | Indra Wijaya | P.J Kepala Desa Sorowako dan Sekertaris Camat Desa Sorowako | IW | 1 orang |
| 3 | Dedy. Laode | Kasi Pemerintahan Desa Sorowako | DL | 1 Orang |
| 4 | Amri Mustari | Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Luwu Timur | AM | 1 Orang |
| 5 | Deslan Situmeang S. Th | Tokoh Masyarakat | DS | 1 Orang |
| 6 | Irene Mananta | Tokoh Masyarakat | IM | 1 Orang |
| 7 | Baharuddin | Tokoh Masyarakat | BD | 1 Orang |
| 8 | Yunus Ambeta | Masyarakat | YA | 1 Orang |
| 9 | Kadir Mananta | Masyarakat | KM | 1 Orang |
| 10 | Saharuddin Lumateri | Masyarakat | SL | 1 Orang |
| Total Informan | | | | 10 rang |

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. *Observation* (observasi)

Observation (observasi), yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di kecamatan , yaitu pengumpulan data dengan melihat secara langsung, pengumpulan data pencatatan yang di lakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat

berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dimana peneliti telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan di ajukan kepada pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung yang bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan dengan implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan perseolan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of*

analysis). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Sumantri (2011) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data karangan suda harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

3.7. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian penelitian membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil

ujin menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

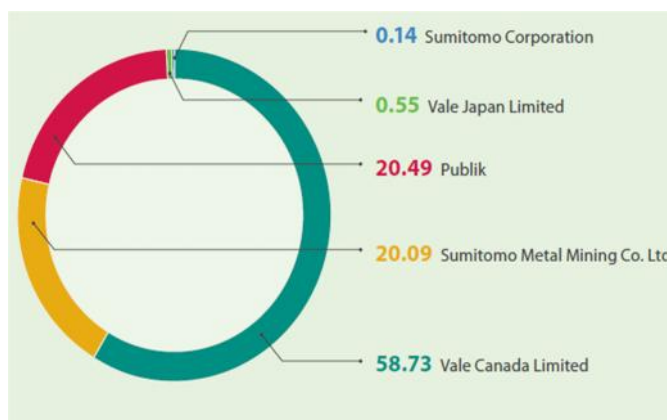
4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran umum PT. VALE INDONESIA,Tbk.

PT International Nickel Indonesia Tbk (Inco) mengganti nama perusahaannya menjadi PT Vale Indonesia Tbk. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang diselenggarakan pada Selasa, 27 September 2011. Setelah disepakati di rapat pemegang saham, perseroan harus segera memproses persetujuan dari sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bursa Efek Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Perubahan nama Inco menjadi PT Vale Indonesia Tbk itu disebabkan masuknya Vale Canada Limited yang mempunyai saham yang lebih besar seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1 : Pemegang saham PT. Vale tahun 2016



Sumber Data : Laporan Tahunan PT. Vale 2016

Selain pergantian nama perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) juga menyepakati pengangkatan Nicolaas D. Kanter sebagai Direktur Utama PT Nickel Indonesia. Nicolaas yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden Komisaris Inco menggantikan posisi Clayton Allen Wenas yang telah mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu juga terdapat pengangkatan Michael O'Sullivan sebagai Direktur Proyek Inco dan Josimar Pires sebagai Direktur Operasi

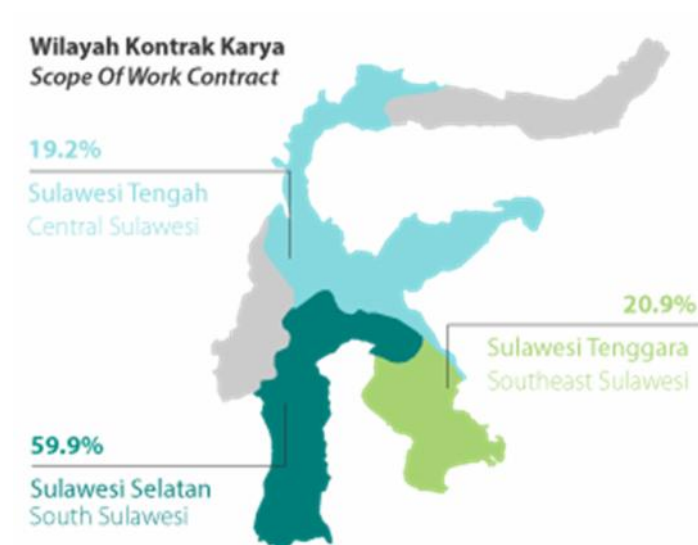
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 1 April 2016, para pemegang saham memutuskan pergantian anggota Dewan Komisaris, dengan telah selesainya masa tugas Arief Taruna Surowidjojo sebagai Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen. Posisi ini dilanjutkan oleh Mark James Travers sebagai Wakil Presiden Komisaris, efektif sejak penutupan RUPST di tahun 2018. Selanjutnya, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar (RUPSLB) pada tanggal 1 Jul 2016, para pemegang saham menerima dan menyetujui pengangkatan Mahendra Siregar sebagai Komisaris Independen, efektif sejak penutupan RUPSLB sampai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di tahun 2018.

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Komposisi dewan komisariat per 31 Desember 2016 PT. Vale dengan Presiden Komisaris Jenifer Anne Maki, Wakil Presiden Komisaris Mark James Travers dan terdapat beberapa Komisaris lainnya yaitu Stuart Alan Harshaw, Nobuhiro Matsumoto, Andrea Marques de Almeida, Robert Alan Morris, Akira Nozaki

beserta dewan Komisaris Independen yaitu Irwandy Arif, Idrus Paturusi, Mahendra Siregar

PT. Vale (yang saat itu bernama PT International Nickel Indonesia) didirikan pada bulan Juli 1968. Kemudian di tahun tersebut PT Vale dan Pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) yang merupakan lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan dan pengolahan bijih nikel. Sejak saat itu PT Vale memulai pembangunan smelter Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Gambar 4.2 : Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Vale 2016 di Sulawesi Selatan



Sumber Data : Laporan tahunan PT. Vale 2016

Melalui Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan yang ditandatangani pada bulan Januari 1996, Kontrak Karya (KK) tersebut telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025. Pada bulan Oktober 2014, PT Vale dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan setelah renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan berubahnya beberapa ketentuan di dalamnya termasuk pelepasan

areal Kontrak Karya (KK) menjadi seluas hampir 118.435 hektar. Ini berarti luasan areal Kontrak Karya (KK) telah berkurang hingga hanya 1,8% dari luasan awal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada saat penandatanganan Kontrak Karya (KK) tahun 1968 seluas 6,6 juta hektar di bagian timur dan tenggara Sulawesi akibat serangkaian pelepasan areal Kontrak Karya (KK).

Tabel 4.1 : Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Vale Tahun 2014

| Provinsi | Blok Konsesi | Hektar (ha) |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| Sulawesi Tengah | Bahodopi | 22,699 |
| Sulawesi Selatan | Sorowako - Towuti | 70,984 |
| Sulawesi Tenggara | Pomala | 20,286 |
| Suasua | | 4,466 |
| Total | | 118,435 |

Sumber Data : Laporan Tahunan 2016 PT. Vale

4.1.2. Visi dan Misi

Visi dan Misi perusahaan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk pencapaian target tertentu maka Perusahaan telah menyusun suatu visi dan misi yaitu :

a. Visi Perusahaan :

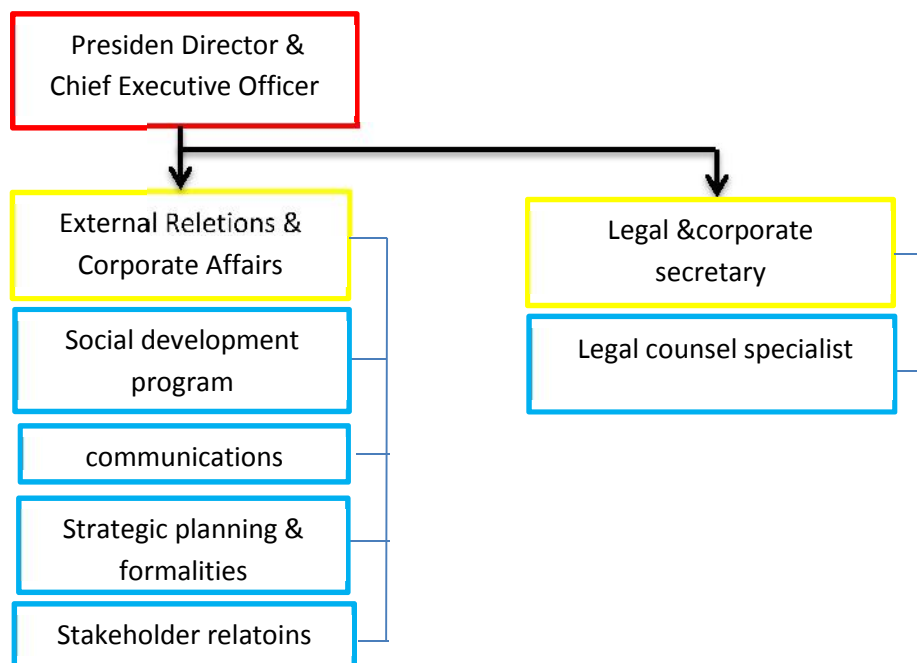
Menjadi perusahaan sumber daya alam nomor satu di Indonesia yang menggunakan standar global dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam.

b. Misi Perusahaan :

Mengubah sumber daya alam menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan.

Di PT. Vale Indonesia, bekerja sama dengan 3.300 karyawan tetap dan 3000 karyawan kontrak yang berpengalaman dan berdedikasi. Dalam aktivitas bisnis kami juga mendorong karyawan untuk mengembangkan keahlian dan pengalaman mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kegiatan bisnis Vale Indonesia terbagi dalam dua lingkup; operasi (operation) dan pendukung (support). Berikut adalah struktur organisasi PT. Vale yang menangani khusus Pembangunan Berkelanjutan:

Gambar 4.3 : Struktur Organisasi PT.Vale Bidang *Corporate Social Responsibility (CSR)*



Sumber Data : Laporan Tahunan Pt. Vale 2016

4.2. Implementasi Program *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur

4.2.1. Implementasi Program *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR)

Implementasi program implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Pada pembahasan tentang implementasi *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) sebelumnya pemerintah Sulawesi Selatan menegaskan tentang kewajiban melaksanakan *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) yang tercantum dalam pasal 13 peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Sulawesi Selatan. Melihat pada peraturan ini setiap perusahaan yang berdiri di Sulawesi Selatan terutama pada Kabupaten Luwu Timur diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun melihat pada obyek penelitian pada PT. Vale selama ini, mereka telah melakukan kegiatan implementasi program *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) dengan cukup baik yaitu adanya tanggung jawab dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi serta pada pemberdayaan lingkungan.

Tabel 4.2 : Program *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR) PT.Vale tahun 2016

| No | Nama Program | Bidang Program |
|----|--|--|
| 1 | Pengelolaan Lingkungan PT. VALE Indonesia Tbk. | <ul style="list-style-type: none">) Pengelolaan emisi udara) Pengelolaan limbah B3) Pengelolaan batuan penutup) Pengelolaan kualitas air) Rehabilitasi lahan |
| 2 | Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat (PTPM) | <ul style="list-style-type: none">) PMDM di bidang Pengembangan Kapasitas Masyarakat) PMDM di bidang Ekonomi) PMDM di bidang Kesehatan) PMDM di bidang Pendidikan |

Sumber Data : Laporan Tahunan 2016 PT. Vale

Tentu itu jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal pada awalnya, selain itu Pada program PMDM masing-masing kecamatan mendapatkan bantuan dana yang berbeda-beda setiap tahunnya pada tahun 2017 dana yang diberikan oleh pihak perusahaan sebesar 300 juta rupiah. Dalam hal ini pihak pemerintah mengadakan rapat bersama pihak perusahaan, pihak pemerintah, serta masyarakat sekitar dalam pengelolaan dana.

Cooperate Sosial Responsibility (CSR) pada perusahaan terlaksana akan tetapi kurang baik dalam implementasi sehingga muncul segala problema yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya pada wilayah tambang perusahaan desa Sorowako hal ini menunjukkan perusahaan kurang memiliki komunikasi yang baik pada masyarakat. Proses pengimplementasian program *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR) perusahaan dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, dan masyarakat sekitar yang merasakan dampak secara langsung akibat adanya perusahaan proses pengimplementasian program

Cooporate Sosial Responsibility (CSR) dijelaskan oleh salah satu informan peneliti yaitu bapak CL selaku karyawan Pt.VALE sebagai berikut :

“kami dari pihak perusahaan telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti *Social Development Program, Community Development, Humas* PT.Vale serta dewan direksi dalam pengambilan keputusan. ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pemberdayaan dan masyarakat Luwu Timur.”(wawancara 10 oktober 2017)

Dalam pembahasan pada indikator implementasi *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) secara umum bahwa PT. Vale telah melakukan program CSR (*cooporate sosial responsibility*) pada masyarakat, ekonomi serta pada lingkungan pada wilayah tambang perusahaan berikut hasil wawancara yang dihimpun dari beberapa informan terkait dengan implementasi Program *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Vale sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan

Pihak perusahaan telah melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan dengan melakukan penghijauan. Dalam hal ini, pihak perusahaan telah membangun di lokasi pembibitan Nursery PT. Vale di Sorowako tempat ini merupakan pembibitan tanaman seperti kayu angin, jabon, sengon, akasiana, serta tanaman lokal antara lain aghatis, betao, belulang, blumei, kolaka, nyatoh, ramin, merati. Selainitu terdapat 14 rusa yang berasal dari titipan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Makassar.

Dalam Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki

kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan pihak PT. Vale oleh bapak CL sebagai berikut:

“Kami pihak perusahaan telah melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan dengan cara melakukan penghijauan serta pemeliharaan lingkungan pasca tambang sesuai dengan peraturan pemerintah”. (Wawancara 10 Oktober 2017)

Dari pernyataan diatas dari salah satu karyawan PT.Vale, bahwa pihak mereka telah melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat memperhatikan lingkungan pasca tambang serta memahami peran penting lingkungan. Dari pernyataan diatas didukung dengan informan oleh salah satu pemerintah desa setempat bapak DL ini sebagai berikut:

“Pihak PT.Vale telah melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan seperti penghijauan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang sebetulnya sangat baik karena mereka tidak hanya menanam kembali pohon pasca tambang tetapi juga melakukan pemeliharaan setelah penanaman”. (Wawancara 19 Oktober 2017)

Dari pernyataan diatas oleh pemerintah desa setempat memperlihatkan bahwa secara garis besar perusahaan telah melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang . Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian perusahaan terhadap rehabilitasi dan reklamasi lahan sangat dipedulikan oleh pihak perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam undang-undang No.25/2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang. NO.40/2007 tentang perseroan terbatas serta Undang-Undang. NO 23 / 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup diatur

bahwa setiap perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan baik pada masyarakat, ekonomi dan lingkungan.

Dari hasil wawancara diatas hal yang sama seperti diungkapkan salah satu masyarakat desa Sorowako tentang reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan dampak positif terhadap masyarakat berikut hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat bapak BD sebagai berikut:

“Pihak perusahaan memang telah melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan seperti yang dapat kita ketahui seperti penghijauan hanya itu yang saya ketahui tentang reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh pihak PT.Vale”.(Wawancara 19 Oktober 2017)

Dari pernyataan diatas dari salah satu tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah dilakukannya kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktifitas-aktifitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat berbagai bidang, dalam hal ini intinya manfaat *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) yaitu dapat mengembangkan diri sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidup bagi masyarakat sekitar .

Dari beberapa pernyataan diatas terdapat hasil wawancara dari salah satu pihak Dinas Lingkungan Hidup yaitu kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Bapak AM yang sama dengan wawancara yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang lain dan sesuai dengan realitas yang terjadi dilapangan hasil wawancara yang didapat sebagai berikut:

“Selama ini perusahaan tersebut melakukan pencapaian kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan seperti penanaman pohon pasca tambang”.(Wawancara 24 Oktober 2017).

Dari pernyataan diatas bahwa perusahaan melakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan seperti yang diungkapkan dari berbagai informan. Perusahaan melakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan, hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah sependapat dengan para masyarakat sekitar. Penghijauan merupakan salah satu program yang dilakukan pihak perusahaan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan seperti penghijauan 85% sepenuhnya perusahaan melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan yang rusak pada wilayah tambang perusahaan. Keadaan yang terjadi pada kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan telah diminimalisir dengan adanya program *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) yang di lakukan oleh pihak perusahaan tambang. Dari pernyataan-pernyataan diatas sesuai dengan data yang dihimpun dari berbagai sumber data olahan dari informan terkait adanya bentuk implementasi program *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam bentuk rehabilitasi dan reklamasi pasca tambang.

2. Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di Bidang Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) merupakan salah satu bentuk kepedulian pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) merupakan salah satu program dari PT.Vale terhadap kesejahteraan masyarakat yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar perusahaan yang merupakan bantuan dana kepada masyarakat. Program ini telah di setujui oleh pihak pemerintah kabupaten Luwu Timur dan merupakan program yang baik bagi masyarakat kabupaten Luwu Timur.

Implementasi *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR) yang baik adalah dengan penerapan *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat, sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Dari teori diatas terdapat hasil wawancara dari salah satu pihak PT.Vale Bapak CL yang sama dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

lain dan sesuai dengan realitas yang terjadi dilapangan hasil wawancara yang didapat sebagai berikut:

“Kami pihak perusahaan telah menjalankan PMDM sebagai salah satu bentuk yang di peruntukkan untuk masyarakat sekitar, kami memberikan bantuan dana kepada pihak pemerintah yang selanjutnya di kelolah oleh pemerintah dan masyarakat sekitar”.(Wawancara 10 Oktober 2017)

Jika dilihat dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pihak perusahaan sendiri mengaku, bahwa ia telah melakukan program Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang pengembangan kapasitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menunjukkan kepedulian kepada masyarakat sekitar yang tidak hanya mendapatkan pekerjaan di perusahaan akan tetapi juga bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan diperusahaan.

Terdapat dari pernyataan diatas adanya kesamaan antara realita dan fakta antara presepsi pihak perusahaan dan pihak pemerintah Kecamatan Nuha oleh Bapak IW, hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Pihak perusahaan telah memberikan dana setiap tahunnya untuk PMDM yang dikelolah oleh pihak perusahaan, pemerintah serta masyarakat yang dananya berbeda-beda setiap tahunnya, kami menggunakan dana tersebut untuk pengembangan kapasitas masyarakat sekitar dalam bentuk mendanai pelatihan-pelatihan buat masyarakat sekitar”.(Wawancara 12 Oktober 2017)

Dari pernyataan di atas dapat kita ambil ketahui bahwa pihak perusahaan telah melakukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pihak perusahaan yang pada dasarnya melakukan program tersebut untuk masyarakat sekitar yang memang merasakan langsung dampak terhadap adanya perusahaan tersebut. Hal ini juga di perkuat dengan pernyataan tokoh masyarakat oleh Bapak BD sebagai berikut :

“Pihak perusahaan dan pemerintah memang telah membantu masyarakat dan dengan adanya program tersebut menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar”. (Wawancara 19 Oktober 2017).

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pihak perusahaan, pemerintah serta masyarakat bekerja sama dalam pengimplementasian program *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR) perusahaan. Dalam hal ini juga terdapat keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat dengan adanya bantuan dari pihak perusahaan seperti peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat sekitar dengan pelatihan-pelatihan dalam bentuk Pelatihan Kewirausahaan oleh PKK. Bantuan pada ibu PKK merupakan bantuan pelatihan herbal kewirausahaan pada 22-23 Maret 2017 di BP3K dengan peserta sebanyak 43 orang se-Nuha. Bantuan ini dalam bentuk pengadaan Pelatihan Herbal Dasar yang diperuntukkan untuk warga agar menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini merupakan kerjasama antara pihak pemerintah setempat dengan pihak perusahaan demi memperkecil angka pengangguran dan memberdayakan masyarakat sekitar terutama para PKK.

3. Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di Bidang Ekonomi

Melihat dari beberapa aspek tersebut dalam bidang ekonomi, *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR) diharapkan dapat meningkatkan atau mempengaruhi suatu bentuk perekonomian, dalam aspek hukum perusahaan dituntut untuk mengikuti setiap peraturan yang berlaku yang menyangkut tentang *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR), dalam artian bahwa setiap perusahaan baik skala lokal maupun perusahaan asing harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan ketentuan hukum yang berlaku, jika dilihat dari segi etika serta kontribusi pada isu sosial perusahaan harus, berperan penting

dalam menjaga etika dalam kegiatan perusahaan tersebut seperti dalam memperhatikan dampak yang dihasilkan, serta menjaga keadaan lingkungan.

Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang ekonomi adalah suatu program *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR) PT.Vale yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pemberian bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana bagi masyarakat sekitar. Bantuan ini dalam bentuk sarana dan prasarana yang di gunakan dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Proses implementasian yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara pengadaan rapat antar pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pemutusan implementasian dana Program Mitra Desa Mandiri (PMDM).

Terdapat dari pernyataan diatas adanya kesamaan antara realita dan fakta antara presepsi pihak perusahaan dan pihak pemerintah Kecamatan Nuha oleh Bapak IW, hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Setiap tahun kami mengadakan rapat dengan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk dana PMDM dalam hal ini masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan proposal ke pemerintah dan kami selaku pemerintah melakukan *survey* lokasi langsung ke masyarakat yang mengajukan proposal dalam pengimplementasaan ini kami telah melakukan dengan cukup baik karena telah meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat sekitar”
(Wawancara 12 Oktober 2017)

Pernyataan tersebut juga membuktikan bahwa dalam pengimplementasian dana Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) dalam di bidang ekonomi yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dana dari Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di

haruskan melalui beberapa tahap baik tahap penyeleksian proposal pengajuan dana, *survey* lokasi, serta kelengkapan data penduduk.

Pada tahun 2015 telah dibuat keputusan oleh masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dana PMDM di bidang ekonomi lebih mengarah pada pembangunan sarana dan prasarana dalam peningkatan ekonomi masyarakatnya. Seperti pembuatan jalan tani dan pembangunan pujasara atau infrastruktur penjualan pada pasar F . terdapat masalah yang timbul dalam implementasi dana PMDM di bidang ekonomi seperti masih banyaknya masyarakat yang keberatan dengan pengelolaan dana PMDM yang telah di alihkan ke infrastruktur peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam implementasi dana PMDM di bidang ekonomi terdapat beberapa masalah seperti pernyataan salah satu tokoh masyarakat Bapak BD sebagai berikut:

“Dalam implementasi dana tahun 2014 yang lalu saya mendapatkan bantuan dana dengan mengajukan proposal akan tetapi beberapa tahun berikutnya saya tidak mendapatkan bantuan lagi”. (Wawancara 19 Oktober 2017)

Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah seperti pada tahun 2016 pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat telah membangun lokasi baru untuk para pedagang pembangunan infrastruktur pasar Sorowako. Pembangunan ini dilakukan untuk penataan pasar pada wilayah Sorowako dan di peruntukkan untuk para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Sorowako.

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang sekaligus menjadi salah satu komite dalam pengimplementasian dana PMDM di bidang ekonomi Bapak DS sebagai berikut:

“Pada tahun lalu saya menjadi salah satu pengurus dalam implementasi dana PMDM dan masalah yang timbul pada umumnya karna kurang taunya masyarakat bahwa dana yang di gunakan sekarang hanya mengarah pada infrastruktur pembangunan ekonomi masyarakat dan tidak di berikan kepada masyarakat secara percuma saja agar hasilnya dapat di lihata langsung oleh pihak pemerintah” (Wawancara 22 Oktober 2017).

Dari pernyataan di atas dapat terdapat masalah yang timbul dari pengimplementasain dana Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang ekonomi, karena kurangnya pemahaman para masyarakat sekitar tentang pengalihan dana PMDM di bidang ekonomi ke infrastruktur peningkatan ekonomi masyarakat. Dari hasil wawancara di atas hal yang sama diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat desa Sorowako tentang proses pengimplementasian dana Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemeerintah terhadap masyarakat berikut hasil wawancara dari salah satu tokoh massyarakat Ibu IM sebagai berikut :

“Pada tahun lalu kami mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk bantuan dalam pengadaan acara masyarakat, akan tetapi tahun ini kami tidak mendapatkan bantuan tersebut bahkan kami membangun masjid dengan hasil sumbangan dari masyarakat dan bantuan dari beberapa tenaga relawan”. (Wawancara 21 Oktober 2017)

Dari hasil pernyataan dia atas membuktikan dalam implementasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat belum efisien karena masih adanya mayarakat yang tidak mengetahui pengalihan dana PMDM di bidang ekonomi, hal ini menjadi dasar dari permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian dana

Program Mitra Desa Mandiri (PMDM). Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak, serta manfaat yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran. Implementasi yang baik adalah proses pengimplementasian yang mendapatkan *feed back* yang baik pula dari masyarakat penerima kebijakan.

4.3. Faktor Penghambat

4.3.1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor dari dalam yang mempengaruhi suatu kegiatan tidak dapat terlaksana dengan semestinya yang telah direncanakan pada sebelumnya. Faktor internal ini bisa dipengaruhi baik dari perusahaan itu sendiri maupun yang menyangkut keterlibatan perusahaan. Suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik jika faktor internal ini yakni sebagai perusahaan menggunakan prinsip *voluntary*. Berikut hasil wawancara salah satu karyawan PT.VALE oleh bapak CL perihal faktor internal yang menghambat implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

“Sejauh ini kami pihak perusahaan tidak mengalami hambatan di bidang internal perusahaan karena kami telah melaksanakan koordinasi serta komunikasi dalam pengimplementasian program pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh tega yang berkompeten di bidangnya”.(Wawancara 10 Oktober 2017)

Dari pernyataan di atas pihak perusahaan tidak mengalami kendala dalam pengimplementasian program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pengimplementasian program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pihak

perusahaan telah mempunyai pihak-pihak yang menangani khusus dalam bidang program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

4.3.2. Faktor Eksternal

Suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik jika terdapat suatu faktor eksternal yang mempengaruhi suatu kegiatan agar dapat dilaksanakan dengan baik sejalan dengan apa yang diinginkan. Faktor eksternal ini dipengaruhi baik pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* dalam menjalankan suatu implementasi kegiatan. Kegiatan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan perusahaan dapat terlaksana dengan baik jika ada dukungan dari pemerintah dan *stakeholder* dari dukungan pemerintah secara langsung sasaran dalam implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat mencapai target sasaran karena ada kerja sama, perusahaan sebagai pelaksana kegiatan program pembangunan berkelanjutan, pemerintah sebagai pengawasan dan kontrol dalam implementasi kegiatan tersebut.

Terkait dengan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT.VALE yang dipengaruhi oleh faktor eksternal adalah kurangnya komunikasi yang baik antara pihak perusahaan, pemerintah serta masyarakat sekitar yang mengalami dampak langsung akibat adanya perusahaan, seperti masyarakat asli yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil karena wilayah mata pencaharian mereka telah di pergunakan perusahaan tanpa sepengetahuan mereka. Penjelasan diatas disimpulkan berdasarkan pada indikator-indikator sebelumnya. Dari pernyataan diatas dibenarkan oleh ketua adat ibu IM sebagai berikut:

“Kami selaku masyarakat asli sorowako pada dasarnya ingin mendapatkan kesempatan hidup setara dengan masyarakat yang lain, akan tetapi dengan adanya perusahaan kami merasakan akibat yang di timbulkan oleh pihak perusahaan karena kurangnya komunikasi yang baik sehingga kami sebagai masyarakat asli merasakan dampak yang kurang baik akibat adanya pihak perusahaan”. (Wawancara 21 Oktober 2017)

Selain dari pernyataan diatas terdapat pula hasil wawancara sebelumnya yang dikutip langsung dari pemerintah desa oleh bapak IW terkait dengan kurangnya komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dan mesyaratkat terkait pengelolaan tambang pada wilayah tersebut. Berikut hasil dari wawancara yang dikutip dari kepala desa Sorowako sebagai berikut:

“Memang kurangnya komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar yang mengakibatkan masalah yang timbul dari pihak masyarakat asli Sorowako dan pihak kami telah bekerja sama dengan pihak perusahaan dalam mengatasi masalah dan tuntutan dalam masyarakat” (Wawancara 12 Oktober 2017)

Kurangnya komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dan masyarakat mengakibatkan permasalahan yang berkembang dalam wilayah masyarakat asli desa Sorowako permasalahan inilah yang mempengaruhi implementasi pada perusahaan PT. VALE tidak berjalan dengan semestinya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sorowako tidak sepenuhnya mensejahterakan masyarakat sekitar karena dalam pengimplementasiannya masih kurang efisien.
2. Perihal tercapainya tujuan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.VALE secara umum telah ada hal yang dilakukan yaitu pencapaian-pencapaian kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan pada desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur seperti penanaman atau penghijauan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
3. Adanya Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang pemberdayaan kapasitas masyarakat secara umum dalam pemberdayaan masyarakatnya pada wilayah tersebut sebagian masyarakat telah di berikan bantuan dalam bentuk pelatihan serta pihak perusahaan telah mempekerjakan sebagian dari masyarakat lokal sebagai karyawan tetap.
4. Adanya Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di bidang ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang pengalihan dana PMDM di bidang ekonomi ke infrastruktur peningkatan ekonomi masyarakat.

5. Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.VALE yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan, pemerintah serta masyarakat sekitar yang mengalami dampak langsung akibat adanya perusahaan.

5.2. Saran

Dari kesimpulan diatas terkait dengan implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.VALE terhadap kesejahteraan masyarakat adalah:

1. Setiap tahun diadakan komunikasi publik antar masyarakat,pemerintah serta pihak perusahaan.
2. Perusahaan di haruskan oleh masyarakat menjalankan program-program yang disepakati bersama khususnya dalam mengurangi kerusakan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Masyarakat dapat melaporkan kepada pemerintah setempat apabila melihat atau mendapati kelalaian perusahaan dalam hal berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Masyarakat saling bahu membahu menjaga lingkungan masing-masing.
5. Perusahaan berkesinambungan memperhatikan tidak hanya pada keadaan lingkungan juga pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
6. Seharusnya mengikutsertakan masyarakat sekitar apabila ada produksi baru untuk kegiatan baru perusahaan, hal ini dilakukan sebagai pengenalan kepada masyarakat sekitar dan menjadi masukan apabila tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

7. Perlunya kerjasama yang baik antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sekitar agar proses implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat berjalan dengan efisien dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari Hasan, (2009) *“implementasi corporate social responsibility (CSR) sebagai modal sosial pada PT Newmont”* Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Abdulsyani (1994). *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan* , Jakarta: Bumi Aksara.
- Ambadar, J. (2008). *CSR dalam Praktik di Indonesia*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Askar Jaya, (2004), *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Bowen, (1953). *Social Responsibility of the businessman*. New York: Harper dan Row.
- Budimanata, (2005). *Memberlanjutan Pembangunan Di Perkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam abad 21*.
- Elkington, J. (1998). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Bussines*, Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
- Hakim, (2013) artikel *“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Faktor Recovery Ekonomi”*.
- Haedar Akip dan Antonius Tarigan (2015). *“Artikulasi konsep implementasi kebijakan” Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya* Jurnal Online <http://carapedia.com/> Diakses pada 6 april 2015.
- Hadi Wahyono, (2012) Artikel *“Sustainable Development (Pengembangan Berkelanjutan)”* diakses <https://damarlanhadi.wordpress.com/2012/12/14/sustainable-developmen>. Pada 15 juni 2015.
- Imawrai, (2011) Artikel *“pembangunan berkelanjutan (sustainable development”* diakses <http://imawrai.blogspot.com/2011/10/pembangunan> pada 15 juni 2015.
- Jaya Askar, (2004) *“Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”*. Jurnal Ilmiah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko, (2014). *“pemberdayaan masyarakat dalam prespektif kebijakan publik”* Alfabeta Bandung.

- Mulyadi (2003): *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya*. Center for Populaton Studies, UGM
- Mardikanto Totok (2014). *Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*.” Alfabeta Bandung.
- Mardikanto, T. (1992). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Nugroho Riant (2012)”*public policy” dinamika kebijakan analisis kebijakan. manajemen kebijakan.*” Gramedia Jakarta.
- Putra Dedi, (2015). “*Komunikasi CSR Politik Membangun Reputasi Etika dan Estetika PR Politik*” Prenadamedia Group
- Pulungan Saadillah, (2013) “*Upaya Pelestarian Lingkungan*” Artikel Gunadarma University.
- Rahmatullah, (2011). *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Rifka Aulia, Agus Suryono (2015)” *Implementasi program corporate social responsibility Dalam rangka mewujudkan sustainable development di bidang lingkungan (Studi tentang CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban* jurnal ilmiah Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 608-612.
- Reintjes,C., Bertushercort and ANN.Watersbayer. (1999). *Pertanian Masa Depan. Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah*. Kanisius. Yogyakarta
- Sugiyono, (2005) “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung : Alfabeta.
- Sujoko Efferin,dkk, (2004), *Metode Penelitian Untuk Akutansi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, (2012) “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Cetakan: Bandung: Alfabeta.

- Sandy, I. M. (1980). *Masalah Tata Guna Tanah –Tata Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Jurusan Geografi FIPIA UI.
- Sabatier, Paul. (1986). “*Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*” *Jornal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Soemarwoto, Otto, (2004), *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembnaganan*, Penerbit Djembatan : Jakarta
- Tanudjaja, Bing Bedjo (2006). *Perkembangan Corporate Sosial Responsibility Di Indonesia*. Universitas Kristen Petra Surabaya . NIRMANA, VOL.8, NO.2. Surabaya.
- Unang Mulkhan (2011) “*Peran Pemerintah dalam Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Upaya Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*.”*Jurnal, ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.2, No.1
- Umar Husein, (2003) “*Evaluasi Kinerja Perusahaan*” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Maria. (2012) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. 1 (1):26-30.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility)*. Fascho Publishing : Gresik.
- W.J.S. Purwadarminta (1985) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wati, Firda. (2012). “*Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup*” diunduh dari (<http://firdawatifirda.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kerusakan-sumber.html>), pada 26 Oktober 2013.
- Yeriko Putra Widenta, (2011) “*Analisis Implementasi Corporate Social Social Responsibility PT. Indosat tbk.tahun 2007-2011 berdasarkan global reporting initiative*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- <http://firdaus-zr06.blogspot.com/2013/07/perundang-undangan-dan-analisis-dampak.html>.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 22 Oktober 1995 di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama dari 2 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Amirullah dan Ibu Kamariah.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 247 Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tamat pada tahun 2007. Setelah tamat SD penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nuha Kabupaten Luwu Timur, tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2013.

Setelah tamat dari pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH MAKASSAR) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.